

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13



BAB II	KERANGKA TEORI	18
	2.1. Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah	18
	2.2. Konsep Kebijakan Publik	25
	2.3. Konsep Implementasi Kebijakan	27
	2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.... ..	29
	2.5. Teoritik Implementasi Kebijakan Implementasi	39
	2.6. Kerangka Berpikir	42
BAB III	METODE PENELITIAN.....	46
	3.1. Desain Penelitian	46
	3.2. Tempat dan Batasan Penelitian	48
	3.3. Sampel dan Responden	49
	3.4. Teknik Pengumpulan Data	53
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA BEKASI	54
	4.1. Kondisi Wilayah	54
	4.2. Potensi Wilayah	58
	4.3. Potensi Penataan Kewenangan	62
BAB V	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KEWENANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI -----	



NOMOR 130-67 TAHUN 2002 DI PEMERINTAH DAERAH

	KOTA BEKASI.....	77
	5.1. Proses Implementasi Kebijakan	
	Pengakuan Kewenangan Kabupaten	
	dan Kota	77
	5.2. Upaya Implementasi	
	Kebijakan.....	93
	5.3. Implikasi Pelaksanaan Keputusan	
	Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67	
	Tahun 2002	97
BAB VI	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN	
	KEWENANGAN.....	100
	6.1. Independent Variabel.....	93
	6.2. Dependent Variabel.....	117
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	136
	7.1. Kesimpulan	136
	7.2 Saran.....	139
	⋮	
	DAFTAR PUSTAKA	142
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Halaman

TABEL :

1 .Kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi Sampai Dengan Tahun 2000.....	80
2. Rekapitulasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah untuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi.....	83.
3. Alokasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002.....	127

BAGAN :

1. Kerangka Pikir	15
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
4. Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota: Daftar Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.



5. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri : Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota per Bidang dari Departemen/LPND.